

# MEKANISME PENYAJIAN PELAPORAN KINERJA KEUANGAN Studi Kasus: DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANDUNG

Muhtarudin<sup>1</sup>, Diana Astuti Rahmawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Komputer Akuntansi IDE LPKIA

Jln. Soekarno Hatta No. 456 Bandung 40266, Telp. 022 75642823, Fax. 022 7564282

[muhtar@lpkia.ac.id](mailto:muhtar@lpkia.ac.id), [dianaastuti.rahmawati@yahoo.com](mailto:dianaastuti.rahmawati@yahoo.com),

## ABSTRAK

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan panduan bagi pemerintahan dalam menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh pembaca laporan. Laporan Keuangan merupakan pertanggung jawaban pemerintah yang telah diberikan dan digunakan dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis komparatif dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta gambaran yang jelas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah berpedoman pada peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 dalam menyajikan laporan keuangan. Sebaiknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung bisa lebih transparansi atau lebih terbuka dalam memberi atau membagi informasi mengenai laporan keuangannya.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan

## 1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sepenuhnya berorientasi pada pemerintah daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan akan berdampak terhadap peningkatan kinerja keuangan. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus mengandung informasi yang relevan dan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kuantitatif laporan keuangan. Pengukuran kinerja keuangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk mengetahui kinerja keuangan yang telah diperoleh melalui mekanisme penyajian laporan keuangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyajian kinerja keuangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ?
2. Bagaimana teknis penyajian laporan kinerja keuangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ?

## Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui cara penyusunan laporan keuangan yang digunakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui teknis penyajian laporan kinerja keuangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

## 2. Dasar Teori

### Pengertian mekanisme

Pengertian mekanisme dalam web [pengertiandefinisi.com/kumpulan-pengertian-menjelaskan-bahwa](http://pengertiandefinisi.com/kumpulan-pengertian-menjelaskan-bahwa) : “ Mekanisme adalah sebagai sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antara beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu”.

### Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Menurut Arif et al.,(2012:3) menjelaskan bahwa, “ Akuntansi Pemerintahan dapat

didefinisikan menjadi suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.”

### **Pengertian Kinerja Keuangan**

Menurut Fahmi (2012:2), “ Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Accepted Accounting Principle), dan lainnya.”

### **Tujuan Pelaporan Keuangan**

Menurut mursyidi (2013:45). “Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **3. Hasil Penelitian**

### **3.1 Prosedur Sistem Berjalan**

Penyajian Pelaporan Kinerja Keuangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

1. Dimulai dengan adanya Penyusunan Draft Spesifikasi Pengadaan Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. Berdasarkan Draft Spesifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dibuat Surat Pengajuan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dibuat 3 Rangkap yang pertama diarsipkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dokumen Kedua diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Dokumen Ketiga diberikan kepada Pejabat Penataan Keuangan.
4. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di verifikasi sesuai tidaknya, kalau tidak sesuai Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ditolak oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan harus membuat Surat Pengajuan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa sudah sesuai dan ditandatangani oleh Pejabat Penataan Keuangan dan membuat SPM. Dokumen SPM 4 Rangkap diberikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengadaan Barang/Jasa yang sudah dtandatangani diarsipkan oleh Pejabat Penataan Keuangan. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani SPM. Dokumen Pertama yang sudah ditandatangani diarsipkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dokumen Kedua yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan kepada Pejabat Penataan Keuangan, Dokumen Ketiga yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Dokumen Keempat yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
6. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK) dan diberikan kepada Pejabat Penataan Keuangan dibuat Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB).
7. Dokumen Laporan Kartu Inventaris Barang (LKIB) dibuat 2 Rangkap yang Pertama diberikan kepada Pejabat Pengguna Barang dan Dokumen Kedua diarsipkan oleh Pejabat Penataan Keuangan.

## **4. Hasil Analisis dan Pembahasan**

### **4.1.1 Analisis Secara Umum Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan juga disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

PP Nomor 24 Tahun 2005. Pada kenyataan dilapangan masih terdapat kendala dalam proses penyajian laporan keuangan tersebut. Faktor penghambat tentang tingkat kompetensi setiap sumber daya manusia berbeda-beda serta perubahan peraturan yang mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

#### **4.1.2 Analisis Secara Khusus Laporan Keuangan**

Penyajian Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah sesuai dengan format penyajian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun untuk Laporan Realisasi Anggaran dalam Akun Belanja menggunakan Akun sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Neraca merupakan salah satu Laporan Keuangan Daerah yang menyajikan informasi mengenai jumlah Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana pada akhir tahun anggaran. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah mengklarifikasikan Aset menjadi Aset Lancar yang terdiri dari Kas, Piutang, Persediaan, Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen. Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Kontruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya. Untuk klarifikasi kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Sedangkan klarifikasi Ekuitas Dana meliputi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Penyajian Neraca pada Akun Aset Lancar menggunakan Akun Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pada Akun Aset Tetap Pos Akun "Jalan, Irigasi dan Jaringan" sudah sesuai penyajian Standar Akuntansi Pemerintahan PP 24 Tahun 2005. Pada pos akun aset lainnya menggunakan Akun sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun dalam penyajian Neraca yang disajikan telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional untuk Akun Pendapatan-LO sesuai dengan Akun Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 24 Tahun 2005 sedangkan untuk Akun Pendapatan-LO menurut Standar Akuntansi Pemerintahan PP

Nomor 24 Tahun 2005 dibagi 3 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisah-LO, Lain-lain PAD yang Sah-LO. Pendapatan Transfer-LO terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO, Bantuan Keuangan-LO. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO terdiri dari Pendapatan Hibah-LO, Dana Darurat-LO, Pendapatan Lainnya-LO. Untuk klarifikasi Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai Ekuitas Awal atau Ekuitas tahun sebelumnya, Surplus / defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena perubahan aset tetap dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas yang disajikan telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian diatas, Laporan Keuangan Daerah yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan telah disajikan sesuai Standar Akuntansi pemerintahan. Catatan Atas Laporan Keuangan juga disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi-informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Daerah. Dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan beberapa strategi yang dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengguna laporan tersebut.

#### **5. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai permasalahan dalam Mekanisme Penyajian Laporan Kinerja Keuangan Di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dibawah oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan yang mengelola keuangan Dinas dan memekanisme

penyajian laporan keuangan sesuai peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 (SAP) dan menghasilkan data pendukung meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan menjadi Laporan Keuangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

2. Teknis Penyajian Laporan Kinerja Keuangan di lihat dari Laporan Realisasi Anggaran meliputi Belanja Pegawai belanja ini antara lain meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Biaya Pengembangan SDM, dan Tunjangan Khusus Daerah sedangkan Belanja Barang belanja ini antara lain meliputi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Lain-lain.

**Daftar Pustaka :**

- [1] Arief, Bahtiar, et al., 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- [2] Fahmi, Irham, SE., M.Si. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung : ALFABETA,cv.
- [3] Kema, Ihwan. 2013. “Penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol.1 (3): hal. 771-781.
- [4] Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- [5] Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- [6] Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [7] Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI No. 24 Th. 2005), Jakarta : Sinar Grafika
- [8] <http://pengertiandefinisi.com/kumpulan-pengertian-mekanisme/> diambil pada tanggal 25 April 2017 Jam 11:34 WIB